

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN, *VALUE FOR MONEY*, DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
OPD KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh:

ELLY ALFIATUR RAHMAWATI

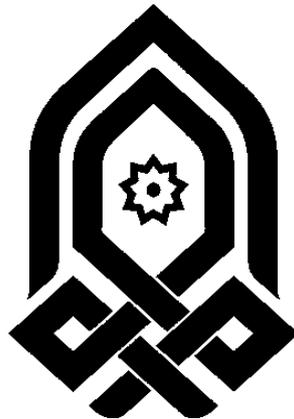
NIM : 4317056

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2021**

**PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN, *VALUE FOR MONEY*, DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA
OPD KABUPATEN BATANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun)



Oleh:

ELLY ALFIATUR RAHMAWATI

NIM : 4317056

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN 2021**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

NAMA : Elly Alfiatur Rahmawati

NIM : 4317056

Judul Skripsi : “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Pengendalian Intern, *Value For Money*, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Kabupaten Batang”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan - bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada IAIN Pekalongan atau perguruan tinggi lainnya.

Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAIN Pekalongan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Kendal, 04 Oktober 2021



Elly Alfiatur Rahmawati

NIM. 4317056

NOTA PEMBIMBING

Agus Arwani, M.Ag

Gg. Pendowo Limo No.33 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lampiran : 2 (Dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Elly Alfiatur Rahmawati

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam IAIN Pekalongan

c.q Kajur Akuntansi Syariah

di- PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Elly Alfiatur Rahmawati

NIM : 4317056

Judul : Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, *Value For Money*, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Batang”

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 04 Oktober 2021

Pembimbing



Agus Arwani, M.Ag

19760807 201412 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Pahlawan No. 52 Rowolaku, Kajen Pekalongan Jawa Tengah

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara:

Nama : **Elly Alfiatur Rahmawati**
NIM : **4317056**
Judul Skripsi : **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, *Value For Money*, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Kabupaten Batang**

Telah diujikan pada Kamis, 02 November 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun).

Dewan Penguji

Penguji I

Ade Gunawan, M.M

NIP. 198104252015031002

Penguji II

Novendi Arkham Muhtadi, M.Akun

NIP. 198911032019081001

Pekalongan, 02 November 2021

Ditandatangani oleh Dekan,



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.

NIP. 19750220 199903 2 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fenom-fenom konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	T	T	Te
ث	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إ ي = ai	إ ي = ī
أ = u	أ و = au	أ و = ū

3. Ta Marbutah

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

جميلة امرأة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فمطاف ditulis *fātimah*

4. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contioh:

رَبَّ	ditulis	<i>rabbānā</i>
بِرَّ	ditulis	<i>al-birr</i>

5. *Kata Sandang (artikel)*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

أَسْ	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
أَرْجُلْ	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
أَسَدٌ	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

أَقْمَرٌ	Ditulis	<i>al-qamar</i>
أَبَدِيْ	ditulis	<i>al-badī'</i>
أَجْلَالٌ	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof / ` /.

Contoh:

أمر

Ditulis

umirtu

سَاءَ ش

Ditulis

syai'un

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas terselesaikannya Skripsi ini dengan baik walaupun dalam penyusunannya terdapat sedikit hambatan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta, Bapak Shobirin dan Ibu Maskanah yang sudah memberikan kasih sayang hingga saat ini, mendengarkan keluh kesah saya, selalu mendoakan, memberikan nasihat baik dan mendukung saya untuk menjalani hidup sesuai dengan keinginan saya.
2. Keluarga dan saudara-saudara saya yang telah mendukung dan memberikan semangat.
3. Calon suami terkasih Ahmad Sobihin yang selalu mendoakan, memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah saya.
4. Sahabat tercinta Ima, Nunik, Ika, Novia, Atina, Dina dan Utami serta teman-teman saya yang lainnya yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberi semangat dan mendengarkan keluh kesah saya.
5. Bapak Agus Arwani, M.Ag yang selalu membimbing saya dengan sabar dan ikhlas.
6. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah Angkatan 2017, Bapak Ade Gunawan, M.M., Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E, M.S.A, dan Bapak Gunawan Aji yang selalu memberi semangat dan dukungan.
7. Almamater tercinta IAIN Pekalongan.

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

(Q.S Al-Insyirah: 6-8)

Percayalah pada dirimu sendiri dan ketahuilah bahwa ada sesuatu di dalam dirimu yang lebih besar daripada rintangan apapun

(Christian D.Larson)

ABSTRAK

ELLY ALFIATUR RAHMAWATI. 2021. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Value For Money, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Kabupaten Batang. Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Jurusan Akuntansi Syariah. Pembimbing Agus Arwani, M.Ag.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik dalam mengelola keuangan untuk disampaikan kepada publik secara terbuka dan jujur untuk dijadikan bahan evaluasi pada tahun berikutnya agar dapat menentukan apakah pemerintah mengalami kegagalan atau keberhasilan dalam mengelola laporan keuangan.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif, teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dan sampel yang diperoleh berjumlah 69 responden dan teknik pengumpulan data menggunakan angket. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, dan koefisien determinasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Batang, sedangkan *value for money* dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada OPD Kabupaten Batang.

Kata Kunci: Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Inter, Value For Money, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRACT

ELLY ALFIATUR RAHMAWATI. 2021. The Effect of Financial Statement Presentation, Internal Control System, Value For Money, and Utilization of Information Technology on Regional Financial Management Accountability in OPD Batang Regency. Thesis of the faculty of islamic economics and business. Sharia Accounting Department. Adviser Agus Arwani, M.Ag.

Regional financial management accountability is the responsibility of local governments to the public in managing finances to be submitted to the public openly and honestly to be used as evaluation material in the following year in order to determine whether the government has failed or succeeded in managing financial reports.

The research method used in this research is quantitative method, the sampling technique is using purposive sampling method and the sample obtained is 69 respondents and the data collection technique is using a questionnaire. Tests in this study using validity, reliability, classical assumption test, multiple linear regression analysis, hypothesis testing, and coefficient of determination.

The results showed that the presentation of financial reports and the internal control system partially had a significant positive effect on the accountability of regional financial management in Batang Regency OPD, while value for money and information technology partially had no effect on financial management accountability in Batang Regency OPD.

Keywords: Presentation of Financial Statements, Inter Control System, Value For Money, Utilization of Information Technology, Accountability of Regional Financial Management

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya , sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, Value For Money Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada OPD Kabupaten Batang” yang disusun sebagai syarat akademis dalam menyelesaikan program studi Sarjan (S1) Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini, penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Zaenal Mustaqim, M. Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Ibu Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pekalongan.
3. Bapak Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah IAIN Pekalongan.
4. Ibu Ria Anisatus Sholihah, S.E, M.S.A selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah IAIN Pekalongan.
5. Bapak Agus Arwani, M.Ag selaku Dosen pembimbing skripsi.
6. Bapak Muhammad Nasrullah, S.E, M.S.I selaku wali Dosen.
7. Segenap Dosen fakultas ekonomi dan bisnis islam IAIN Pekalongan beserta staff.
8. Kedua orang tua dan sahabat yang selalu memberikan doa dan dukungan.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Namun dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekalongan, 04 Oktober 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elly Alfiatur R.', with a long horizontal stroke extending to the right.

Elly Alfiatur R.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
HALAMAN MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
DAFTAR GRAFIK	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Sistematika Pembahasan	13

BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Deskripsi Teori.....	15
1. Teori Keagenan	15
2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	16
3. Penyajian Laporan Keuangan	21
4. Sistem Pengendalian Intern.....	26
5. Value For Money	30
6. Pemanfaatann Teknologi Informasi	35
B. Telaah Pustaka	37
C. Kerangka Berpikir.....	50
D. Hipotesis.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	56
B. Setting Penelitian'	56
C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel	57
1. Variabel Penelitian	57
2. Definisi Operasional Variabel.....	57
D. Populasi dan Sampel	60
1. Populasi	60
2. Sampel.....	60
E. Subjek Penelitian.....	61
F. Sumber Data.....	61
1. Data Primer	61

2. Data Sekunder	62
G. Teknik Pengumpulan Data	62
1. Angker/Kuisisioner	62
2. Observasi	63
H. Metode Analisi Data	63
1. Analisis Deskripti	63
2. Analisis Uji Instrumen	64
a. Uji Validitas	64
b. Uji Reliabilitas	65
3. Uji Asumsi Klasik	66
a. Uji Normalitas	66
b. Uji Multikolinieritas	67
c. Uji Heteroskedastisitas	67
d. Uji Linieritas	68
4. Uji Regresi Linier Berganda	68
5. Analisa Uji Hipotesis	69
a. Uji t (Parsial)	69
b. Uji F (Simultan)	70
c. Koefisien Determinasi	71
BAB IV ANALISI DATA DAN PEMBAHASAN	72
A. Gambaran Umum Lokasi	72
B. Hasil Penelitian	75
1. Deskripsi Responden	75

2. Uji Kualitas Data.....	83
a. Uji Validitas	83
b. Uji Reliabilitas	87
c. Uji Asumsi Klasik	91
1) Uji Normalitas.....	91
2) Uji Multikolinieritas.....	92
3) Uji Heteroskedastisitas.....	94
4) Uji Linieritas	96
d. Analisis Regresi Linier Berganda	98
e. Analisis Uji Hipotesis	101
1) Uji t (Parsial).....	101
2) Uji F (Simultan)	102
3) Koefisien Determinasi.....	103
C. Pembahasan.....	107
1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	107
2. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	109
3. Pengaruh Value For Money Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	111
4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	113

BAB V PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Keterbatasan Penelitian.....	116
C. Implikasi Teoritis dan Praktis	118
1. Implikasi Teoritis	118
2. Implikasi Praktis.....	118
D. Saran.....	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Batang 2019	4
Tabel 2.1 Peneliatian Yang Relevan	36
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	53
Tabel 3.2 Skor Skala Likert	59
Tabel 4.1 Kualifikasi Kuisisioner	74
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif Variabel.....	79
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Penyajian Laporan Keuangan	82
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Sistem Pengendalian Intern.....	82
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas <i>Value For Money</i>	83
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Pemanfaatan Teknologi Informasi	84
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.....	84
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Penyajian Laporan Keuangan.....	85
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas Sistem Pengendalian Intern	86
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas <i>Value For Money</i>	87
Tabel 4.11 Hasil Uji Reliabilitas Pemanfaatan Teknologi Informasi	88
Tabel 4.12 Hasil Uji Reliabilitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	89
Tabel 4.13 Uji Normalitas.....	90
Tabel 4.14 Uji Multikolinieritas.....	91
Tabel 4.15 Uji Heteroskedastisitas.....	93
Tabel 4.16 Uji Linieritas Penyajian Laporan Keuangan	94
Tabel 4. 17 Uji Linieritas Sistem Pengendalian Intern	95

Tabel 4.8 Uji Linieritas Value For Money.....	95
Tabel 4.19 Uji Linieritas Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	96
Tabel 4.20 Analisis Regresi Linear Berganda.....	97
Tabel 4.21 Uji F.....	99
Tabel 4.22 Uji Koefisien Determinasi	100
Tabel 4.22 Uji t	101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Konsep Value for money.....	31
Gambar 2.2 Model Penelitian	44
Gambar 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin	74
Gambar 4.2 karakteristik responden berdasarkan usia.....	75
Gambar 4.3 Karakteristi responden berdasarkan lama menjabat.....	77
Gambar 4.4 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir	78

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1 Grafik Penerimaan dan Penolakan Uji t	65
Grafik 3.2 Grafik Penerimaan dan Penolakan Uji F	66
Grafik 4.1 Grafik <i>Scatterplot</i>	93
Grafik 4.2 Uji F	101
Grafik 4.3 Penerimaan H1 Variabel Penyajian Laporan Keuangan	103
Grafik 4.4 Penerimaan H2 Variabel Sistem Pengendalian Intern	104
Grafik 4.5 Penolakan H3 Variabel Value for Money	105
Grafik 4.6 Penolakan H4 Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi	105

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuisisioner Penelitian

Lampiran 2 Data Mentah Kuisisioner

Lampiran 3 Hasil Perhitungan SPSS

Lampiran 4 Distribusi Asumsi Klasik dan Regresi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Surat Penelitian

Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, menjadi tuntutan umum bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mempertanggungjawabkan kinerja pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban tersebut terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu pemerintah diwajibkan untuk menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Terkait dengan permasalahan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka pemerintah menerbitkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (PP. No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan sebuah organisasi dalam mencapai suatu tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, maka diwajibkan bagi organisasi pemerintah untuk menyampaikan seluruh informasinya terkait aktivitas serta kinerjanya secara periodik (Darwis & Meliana, 2020). Oleh karena itu,

pengimplemeneasian *good governance* merupakan cara yang tepat agar pemerintah terbuka dengan kondisikeuangannya kepada publik.

Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik maka pemerintah daerah perlu menerapkan serta mengembangkan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata. *Good governance* merupakan tata kelola organisasi yang dapat membentuk pemerintahan yang terbuka, adil, serta dapat memepertanggungjawabkan tugasnya. Sehingga pemerintah dapat menata dan membangun organisasinya menjadi berguna, bermanfaat, bersih, bertanggungjawab, dan terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi terciptanya pemerintahan yang baik merupakan salah satu keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugasnya membangun daerah. Oleh karena itu penerapan prinsip-prinsip *good governance* dianggap penting sebagai wujud pemerintah untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait di dalam pemerintahan. *Good governance* memiliki prinsip, salah satunya ialah akuntabilitas (Noor dkk., 2021).

Akuntabilitas adalah wujud tanggung jawab atas integritas keuangan, pengungkapan, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Pemerintah dikatakan mempunyai tata kelola yang baik apabila segala aktivitasnya dilakukan secara bertanggung jawab (Sari dkk., 2020). Namun saat ini pemerintah masih banyak kekurangan dalam memberikan pertanggungjawaban informasi keuangan. Fenomena tersebut terjadi karena terdapat temuan-temuan terkait ketidakpatuhannya suatu pemerintahan terhadap peraturan undang-undangan yang dampaknya terhadap financial

kemudian dapat berakibat kerugian pada pelaporan keuangan pemerintah. Fenomena tersebut semakin meningkat karena adanya faktor lain yang banyak terjadi di Indonesia yaitu kasus korupsi. Oleh karena itu, jika pengelolaan akuntabilitas buruk maka akan merugikan banyak pihak baik masyarakat maupun negara.

Untuk melakukan penilaian atas kualitas akuntabilitas keuangan negara atau daerah diperlukan sebuah lembaga negara yang kompeten yaitu Badan Pengawas Keuangan (BPK) untuk mengawasi akuntabilitas keuangan negara serta membina penyelenggaraan sistem pengendalian intern. BPK juga secara berkala melaksanakan pengawasan akuntabilitas keuangan daerah di seluruh wilayah, termasuk di Provinsi Jawa Tengah (Situs Resmi BPKP-RI). Saat BPK memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pada kenyataannya BPK masih mendapati berbagai masalah terkait dengan pengelolaan keuangan di pemerintahan. Dengan adanya hal ini menunjukkan masih kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah (Lewier & Kurniawan, 2016).

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pemerintah Kabupaten Batang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan mampu mempertahankan opini tersebut selama 4 kali berturut-turut yaitu terhitung mulai Tahun Anggaran 2016-2019. Dimana seharusnya opini WTP dapat menunjukkan bahwa pemerintah tersebut telah mampu menyajikan laporan keuangannya secara akuntabel dan transparan. Namun pada kenyataannya,

selama memperoleh opini WTP dari Tahun Anggaran 2016-2019 khususnya pada tahun 2019 BPK masih menemukan adanya beberapa kelemahan terkait Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Batang yang masih memerlukan perhatian untuk ditindak lanjuti (BPK Perwakilan Propinsi JAWA TENGAH). Adapun kelemahan dalam penyusunan laporan keuangan yang ditemukan oleh BPK yaitu terkait:

Tabel 1.1

Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Batang 2019

NO	Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Kabupaten Batang 2019
1	Kebijakan akuntansi Pemkab Batang belum mengatur tentang pencatatan aset tetap jalan lingkungan sebesar Rp 15.495.653.010,00 dalam KIB D belum ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
2	Adanya ketidakpatuhan yang ditemukan oleh BPK dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di Pemerintah Kabupaten Batang. Pokok temuan ketidakpatuhan tersebut yaitu kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp 113.418.718,31 pada empat OPD yaitu BLUD RSUD Batang, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasann Permukiman (DPRKP), Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang).

Sumber: PPID Kabupaten Batang

Dengan adanya temuan tersebut PEMKAB Batang saat menyajikan laporan keuangannya belum seluruhnya dapat dikatakan memenuhi kriteria akuntabilitas. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Batang masih memerlukan adanya peningkatan dalam mengelola laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang bermutu dan akuntabel.

Untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah harus meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan baik pusat maupun daerah. Karena

kegiatan pemerintahan merupakan wujud dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Superdi dkk., 2017). Oleh karena itu pemerintah harus memperbaiki laporan keuangannya serta menyediakan seluruh informasi keuangan secara relevan, jujur, dan terbuka kepada publik. Kemudian untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya yaitu penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian internal, *value for money* dan pemanfaatan teknologi informasi.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat tercipta dengan melaksanakan reformasi dalam penyajian laporan keuangan yaitu pemerintah diharuskan mampu menyediakan seluruh informasi keuangan yang relevan secara jujur dan terbuka kepada publik. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Penyajian laporan keuangan merupakan bentuk perwujudan pertanggungjawaban atas ketepatan pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diharuskan dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan (permendagri no 13 tahun 2006). Dengan memperjelas pelaporan keuangan pemerintah daerah maka pemerintah telah mampu menyajikan laporan keuangannya dengan baik. Sehingga dapat terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian yang mengkaji mengenai penyajian laporan keuangan yang dilakukan oleh Penelitian Sabriani dan Rahayu (2020) mendapatkan kesimpulan bahwa penyajian laporan keuangan yang lengkap dan benar dapat

berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Indragiri Hulu. Penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2018) bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di SKPD Kabupaten Pekalongan. Namun kedua penelitian tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Embun (2017) bahwa penyajian laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah..

Selain itu, untuk mewujudkan akuntabilitas diperlukannya Sistem pengendalian internal yang memadai. Menurut Embun Sistem pengendalian intern merupakan usaha di dalam sebuah organisasi yang dilakukan oleh pimpinan dan seluruh anggotanya untuk mencapai tujuan meliputi pelaporan keuangan yang efektif dan efisien, berkualitas dan andal, melindungi aset negara, serta menaati kebijakan yang telah dibuat. Untuk meningkatkan mutu atas keandalan laporan keuangan serta meyakinkan stakeholders, sebuah organisasi perlu menerapkan sistem pengendalian intern yang sesuai (Sari dkk., 2017). Mirza menerangkan bahwa adanya sistem pengendalian intern yang tepat akan membentuk aturan yang jelas pada sebuah organisasi pemerintahan. Jadi, sistem yang terdapat didalam pengelolaan keuangan lebih terstruktur sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik serta memberikan keyakinan kepada publik (Masyhur dkk., 2017).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulyani (2018) hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan daerah di SKPD Kabupaten Pekalongan. Didukung juga oleh penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2017) bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Namun berbeda dengan riset Melisha (2018) yang menyatakan sistem pengendalian intern tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Wonogiri.

Value for Money menjadi faktor selanjutnya yang dapat membantu terwujudnya akuntabilitas. *Value for money* adalah pokok dari penilaian kinerja sektor publik dengan memperhitungkan *input*, *output*, serta *outcomenya* secara menyeluruh (Arifani dkk., 2018). *Value for money* merupakan prinsip yang digunakan sebagai bentuk pengolaan anggaran yang baik. Organisasi sektor publik berorientasi pada pemberian layanan yang optimal kepada masyarakat. Maka ketika memberi pelayanan yang optimal pada masyarakat, pemerintah diharuskan untuk lebih reponsif dan cepat tanggap. Prinsip *value for money* diyakini dapat memperbaiki kinerja pada sektor publik. Penerapan *value for money* menekankan pada dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan dan pengembangan sumber daya publik (Lantowa & Machmud, 2020). Sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, maka pemerintah harus menerapkan komponen *value for money* sebagai sarana untuk mengelola serta

memanfaatkan dengan baik sumber daya yang telah diamankan (Renyowijoyo, 2008).

Namun, organisasi pemerintah saat ini dinilai oleh sebagian besar masyarakat sebagai organisasi yang sering melakukan pemborosan dana, sumber kebocoran dana dan organisasi yang selalu merugi. Penelitian Julie menyatakan, bahwa pemerintah saat mengelola keuangan serta sumber daya publik belum mampu mengimplementasikan komponen ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Sehingga pertanggungjawaban kepada publik belum terlaksana dengan tepat. Dengan demikian *value for money* jika diaplikasikan dengan tepat dapat menjadi peranan penting untuk mewujudkan akuntabilitas publik. Penelitian yang dilakukan oleh Anita (2020) yang menyatakan bahwa *value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada BPKAD Kota Palopo. Hasil penelitian tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yani (2020) ia menyatakan bahwa Konsep *Value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan di era digital di BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan. Namun hal ini bertentangan dengan riset Pramudita (2017) yang menunjukkan hasil bahwa *value for money* tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Wonogiri.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 Pemerintah diwajibkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi terkait dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk meningkatkan

kemampuannya dalam mengelola keuangan daerah, serta menyalurkan informasi keuangan daerah kepada publik. Dengan adanya peraturan tersebut maka pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi faktor dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Riedy menyebutkan bahwa dukungan penggunaan teknologi informasi ini juga membantu mempercepat proses penyampaian dan pemahaman informasi, khususnya dalam mengantisipasi intensitas perubahan-perubahan peraturan pemerintah daerah yang sering terjadi (Riandani, 2017).

Menurut Isnaeni untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi maka dapat memanfaatkan teknologi informasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, pemerintah daerah dapat meningkatkan usahanya untuk mengelola keuangan dan menyampikannya kepada publik melalui penyusunan serta pelaporan keuangan daerah yang lebih cepat, akurat, tepat, sehingga dapat mengurangi salah saji (Nurkhasanah, 2019). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erliana (2020) menunjukkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Desa di Kecamatan Ceper. Hasil penelitian yang serupa juga diungkapkan oleh Santoso (2016) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Lampung Timur. Namun Arsiliya (2019) melakukan penelitian dan mendapatkan hasil bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Penelitian terhadap penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian intern, *value for money*, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah menarik untuk dilakukan penelitian, hal ini dikarenakan opini yang didapatkan oleh OPD Kabupaten Batang selama empat tahun berturut-turut memperoleh WTP yang seharusnya laporan keuangan yang dihasilkan oleh OPD Kabupaten Batang telah disajikan dengan transparan dan akuntabel secara keseluruhan. Namun dalam penilaian yang dilakukan, BPK masih menemukan adanya kelemahan dan ketidakpatuhan terkait sistem pengendalian intern dan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan adanya temuan tersebut maka Pemerintah Kabupaten Batang masih perlu untuk ditindaklanjuti agar keseluruhan informasi keuangan dapat disajikan dengan lengkap dan benar sehingga akuntabilitas dapat benar-benar terwujud.

Dengan adanya fakta dan temuan yang telah diuraikan diatas, terdapat perbedaan antara temuan dan hasil riset terdahulu terkait beberapa faktor yang dapat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang masih menunjukkan hasil yang berbeda satu sama lain. Untuk mendapatkan hasil yang lebih konsisten, maka peneliti tertarik untuk melakukan riset lebih lanjut. Dari paparan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melaksanakan riset dengan judul **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern, *Value for Money*, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pada OPD Kabupaten Batang”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah pada riset ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah *value for money* berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini sesuai dengan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui apakah sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
3. Untuk mengetahui apakah *value for money* berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
4. Untuk mengetahui apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh secara positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam riset ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi mahasiswa, hasil dari riset diharapkan mampu memberi lebih banyak wawasan dan pengetahuan mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan, riset ini diharapkan juga dapat menjadi rujukan bagi riset-riset selanjutnya.
- b. Riset ini diharapkan bagi pemerintah daerah dapat menjadi sebuah bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sehingga dapat memperbaiki kualitas pengelolaan laporan keuangannya.
- c. Bagi perguruan tinggi, riset ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan perihal akuntansi sektor publik yang berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dan bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan untuk risetnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Batang, riset ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah dalam menyusun laporan keuangannya agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atas dana yang dikelolanya. Selain itu, manfaat lain bagi pemerintah

adalah pemerintah semakin mengetahui pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan.

- b. Bagi masyarakat, sebagai pihak yang menyerahkan amanah, masyarakat dapat langsung memantau bagaimana dana dipergunakan serta dapat memantau kinerja dari pemerintah. Dengan adanya riset ini diharapkan pemerintah memberi hak kepada masyarakat untuk keikutsertaannya dalam memantau kinerja pemerintah, selain itu masyarakat diberikan kemudahan untuk mengakses laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah. Keikutsertaan masyarakat diharapkan mampu turut serta mewujudkan pemerintah yang akuntabel dan amanah.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penelitian ini menjelaskan 5 bab yang terdiri dari sub bab. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan pembahasan permasalahan yang diteliti agar pembahasan dapat disampaikan dengan baik dan benar. Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi tentang tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tentang deskripsi teori-teori yang digunakan dalam penelitian, telaah pustaka, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Bab III merupakan metodologi penelitian yang berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, variabel dan definisi operasional, populasi dan sampel, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV merupakan analisis data dan pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi, hasil dari analisis data penelitian, dan pembahasan dari analisis data.

BAB V PENUTUP

Bab V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan implikasi teoritis dan praktis, dan saran untuk peneliti selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait dengan penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian intern, *value for money* dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pada OPD Kabupaten Batang maka mendapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Batang,
2. Variabel sistem pengendalian intern secara parsial berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Batang.
3. Variabel *Value for money* secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Batang,.
4. Variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada OPD Kabupaten Batang,

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tentunya memiliki keterbatasan yang memerlukan perbaikan dan pengembangan dalam studi-studi berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan dalam studi ini antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan sikap kepedulian dari responden di dalam menjawab pernyataan kuisisioner yang diberikan peneliti. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi penelitian dengan metode survei wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pernyataan kuisisioner dari peneliti.
2. Lingkup penelitian ini terbatas pada variabel tertentu saja sehingga masih dimungkinkan untuk mencari variabel-variabel lain yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
3. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi jawaban melalui kuisisioner yang diberikan sehingga terkadang timbul perbedaan interpretasi atas maksud dan tujuan pernyataan.
4. Karena keterbatasan waktu dan tenaga, peneliti hanya meneliti pada OPD Kabupaten Batang sehingga hasilnya hanya mencerminkan kondisi yang ada pada OPD Kabupaten Batang tersebut, dan tidak dapat digeneralisasikan pada semua keadaan di OPD Kabupaten lain.
5. Peneliti hanya mengambil 21 sampel yang terdiri dari 17 Dinas dan 4 Badan pada OPD Kabupaten Batang dengan jumlah responden 84, karena keterbatasan waktu dan tenaga maka jumlah kuisisioner yang kembali sebanyak 69 kuisisioner.
6. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dalam penelitian tersebut yaitu dengan menggunakan sampel seluruh OPD, tidak hanya dalam lingkup Kedinasan atau Badan melainkan seluruh OPD termasuk Kecamatan dan Kantor yang berada pada lingkup OPD.

C. Implikasi Teoritis Dan Praktis

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait pengaruh penyajian laporan keuangan, sistem pengendalian intern, *value for money*, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini walaupun tidak semua variabel memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah namun terdapat dua variabel yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yaitu penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian intern sedangkan variabel yang tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan yaitu *value for money* dan pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, penelitian ini dibuat diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait *agency teory* yang berhubungan dengan pemerintahan.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memiliki implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Batang hasil penelitian ini dapat menjadi suatu bahan untuk evaluasi OPD Kabupaten Batang dalam proses pengelolaan keuangan sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat tercapai dengan baik. Selain itu bagi OPD Kabupaten Batang dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah

dapat meningkatkan kinerjanya sehingga pertanggungjawabannya kepada masyarakat dan pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan dapat terpenuhi. Untuk meningkatkan kinerja pegawai, maka seharusnya OPD melakukan pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan keuangan, sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat terwujud.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang diberikan untuk pengembangan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat mengembangkan penelitiannya yang lebih baik dan disarankan untuk menambah variabel-variabel yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. Peneliti selanjutnya perlu menambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuisioner.
3. Untuk OPD Kabupaten Batang diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan penyajian laporan keuangan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi para pegawai terkait penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Selain itu OPD Kabupaten Batang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan keahliannya untuk

mengefektifkan sistem pengendalian intern sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan terbebas dari kesalahan pencatatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Pengaruh Penerapan Dimensi Value For Money Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato. *Gorontalo Accounting Journal*, 1(1), 10–20.
- Arifani, C., Salle, A., & Rante, A. (2018). PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DA PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGARAN BERBASIS VALUE FOR MONEY (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Jayapura). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH*, 13(1). <https://doi.org/10.52062/jakd.v13i1.1426>
- Armel, R. Y. G., Nasir, A., & Safitri, D. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai)* [PhD Thesis]. Riau University.
- ARSILIYA, K. (2019). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Bandar Lampung)*.
- Arumanti, N. R. (2018). *Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Penyajian Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Internal Control sebagai Variabel Moderating*.
- Arwani, A. (2016). *Akuntansi Perbankan Syariah: Dari Teori ke Praktik (Adopsi IFRS)*. Deepublish.
- Asfiryati, D., Savitri, E., & Al Azhar, A. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada SKPD Kota Dumai)*.
- BPK Perwakilan Propinsi JAWA TENGAH. (t.t.). Diambil 7 Oktober 2020, dari <https://jateng.bpk.go.id/>
- Buku Mardiasmo, (2002). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: CV. Andi Offset. - Penelusuran Google. (t.t.). Diambil 6 Oktober 2020, dari [https://www.google.com/search?q=buku+Mardiasmo%2C+\(2002\).+Akuntansi+Sektor+Publik%2C+Yogyakarta%3A+CV.+Andi+Offset.&rlz=1C1PRFE_enID697ID786&oq=buku+Mardiasmo%2C+\(2002\).+Akuntansi+Sek](https://www.google.com/search?q=buku+Mardiasmo%2C+(2002).+Akuntansi+Sektor+Publik%2C+Yogyakarta%3A+CV.+Andi+Offset.&rlz=1C1PRFE_enID697ID786&oq=buku+Mardiasmo%2C+(2002).+Akuntansi+Sek)

tor+Publik%2C+Yogyakarta%3A+CV.+Andi+Offset.&aqs=chrome..69i57j69i60.2960j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8

- Darmawan, D. (2013). *Metode penelitian kuantitatif*.
- Darwis, H., & Meliana, M. (2020). PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Multiparadigma (JEAMM)*, 1(2).
- DAUN LAMBA, A. (2020). *PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN VALUE FOR MONEY TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus pada Kantor BPKAD Kota Palopo)*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO.
- Erliana, S. D. (2020). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, KOMITMEN ORGANISASI, TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA (Studi Pada Pemerintah Desa di Kecamatan Ceper)*.
- Fauziyah, M. R., & Handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 6(6).
- Harmain, H., Daulay, A. N., & Enre, D. T. (2020). Analisis Value For Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2).
- Ichalina, F., & Handayani, N. (2019). PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(5).
- Idward, N. N. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Pemoderasi (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa)* [PhD Thesis]. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Imam, G. (2011). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Indria, N. A. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya*.

- Lantowa, F., & Machmud, F. (2020). PENGARUH PENERAPAN DIMENSI VALUE FOR MONEY TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango. *Journal Syariah and Accounting Public*, 1(1), 1–14.
- Lewier, C. N., & Kurniawan, C. H. (2016). Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten. *Jurnal Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- LUBIS, A. (2020). *PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI TERHADAP SISTEM PENGELOLAAN DANA DESA SERTA DAMPAK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG*.
- Machali, I. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif. Cet. I (Yogyakarta: Program Studi*.
- Magdalena Hesti Kurniawati, M. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jember) The Effect of Financial Statements Presentation, Financial Statements Accessibility and Regional Financial Accounting Systems to Transparency and Accountability Regional Financial Management (Study of Jember Sub Department of Local Government)*. <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/73794>
- Maksyur, N. V., Tanjung, A. R., & Hariyani, E. (2015). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu)*.
- Mansyuer, T. Y., & Efendi, D. (2020). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, PENYAJIAN DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(9).
- Mardiasmo, D., & MBA, A. (2009). *Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI*.
- Mardiasmo, M. (2000). Reformasi pengelolaan keuangan daerah: Implementasi value money audit sebagai antisipasi terhadap tuntutan akuntabilitas publik. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 4(1), 35–49.
- Masyhur, M., Hardi, H., & Silfi, A. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Dan Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas*

Pengelolaankeuangan Daerah Kota Dumai [PhD Thesis]. Riau University.

- Mawaddah, M., Murhaban, M., & Sari, D. K. (2020). PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAN PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan (JAKTABANGUN) STIE Lhokseumawe*, 5(2), 79–90.
- Mulyani, S. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Value For Money, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018)*.
- Nalim, N., & Salafudin, S. (2012). *Statistika Deskriptif*.
- Narbuko, C., & Achmadi, A. (2013). *Metodologi penelitian: Memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian seta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Bumi Aksara.
- Nasir, A., & Oktari, R. (2011). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Ekonomi*, 19(02).
- Nasirwan, M. M. R. (2017). AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI BERBASIS BAGI HASIL (ANALISIS TERHADAP KARyAWAN ToKo DI KoTA BEUREUNUEN). *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS ISLAM*, 2(2).
- Noor, M. T., Fidiana, F., & Handayani, N. (2021). PENGARUH KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN. *MAPAN: Jurnal Manajemen Akuntansi Palapa Nusantara*, 5(2), 8–29.
- Nur, I., & Supomo, B. (1999). *Metode penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*.
- Nurkhasanah, I. (2019). *PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, PARTISIPASI PENGANGGARAN, PENGAWASAN, DAN KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA* [PhD Thesis]. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang.

- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172.
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Batang*. (t.t.). Diambil 7 Oktober 2020, dari <https://ppid.batangkab.go.id/informasi/setiap-saat/opini-bpk-atas-lkpd>
- Pertiwi, D. (2016). *Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Mewujudkan Good Governance pada Dispenda Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Pramudita, A. (2017). *PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, VALUE FOR MONEY DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Ponorogo)*.
- Prayitno, D. (2010). *Paham Analisa Data Statistik Dengan SPSS*. Yogyakarta: MediaKom.
- Primayani, P. R., Herawati, N. T., AK, S., Darmawan, N. A. S., & SE, A. (2014). Pengaruh Pengendalian Internal, Value for Money, Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD di Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 2(1).
- Purwanto, A. (t.t.). Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Administrasi Publik, Dan Masalahmasalah Sosial*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Puspa, D. F., & Prasetyo, R. A. (2020). PENGARUH KOMPETENSI PEMERINTAH DESA, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(2), 281–298.
- PUTRI, M. N. F., & Anim, R. (2018). *PENGARUH AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN, SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (Studi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Wonogiri)*.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, alih Bahasa Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani.

- Rambe, A. Y. F. (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Medan Estate, Analisis Penerapan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Desa Medan Estate, Kab. Deli Serdang)*.
- Renyowijoyo, M. (2008). *Akuntansi Sektor Publik Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Riandani, R. (2017). PENGARUH KOMPETENSI SDM, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota). *Jurnal Akuntansi*, 5(2). <http://103.216.87.80/students/index.php/akt/article/view/2604>
- Rismawati, T. (2019). *PENGARUH KOMPETENSI APARAT PENGELOLA DANA DESA, KOMITMEN ORGANISASI PEMERINTAH DESA, PARTISIPASI MASYARAKAT, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA*.
- Sabriani, A. A., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *JAE (JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI)*, 5(2), 14–23.
- Sanawati, C. K. (2019). *Implementasi Pengukuran Value for Money di BAZNAS Kota Madiun*.
- Santoso, E. B. (2016). *PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur) THE INFLUENCE OF INTERNAL GOVERNMENTAL CONTROL SYSTEM, THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY AND HUMAN RESOURCES COMPETENCE TO DISTRICT FINANCIAL ACCOUNTABILITY (Empirical Study at East Lampung District)*.
- Santoso, P. B. (2005). *Analisis Statistik dengan Microsoft Excel & SPSS*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Saputra, J. (2015). *PENGARUH VALUE FOR MONEY (EKONOMIS, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS) TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK (Studi Kasus Pada Badan Pemerintah Daerah Kota Palembang)*.
- Sari, E. W., Azlina, N., & Julita, J. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu [PhD Thesis]*. Riau University.

- Sari, R. P., Mulyani, C. S., & Budiarto, D. S. (2020). Pentingnya Pengendalian Internal Untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 6(1), 1–10.
- Sayuti, S. (2018). *Perwujudan Nilai-nilai Transparansi, Akuntabilitas, dan Konsep Value For Money dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik (Studi Kasus pada Bappeda Kabupaten Gowa)*.
- Septa, P. (2018). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Ponorogo* [PhD Thesis]. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Setiyanningrum, I., & Isroah, I. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Dengan Konsep Value For Money Pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Di Yogyakarta. *Jurnal Profita: Kajian Ilmu Akuntansi*, 5(3).
- Siregar, S. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Dengan*.
Situs Resmi BPKP-RI. (t.t.). Diambil 7 Oktober 2020, dari <http://www.bpkp.go.id/>
- Sugiyono, P. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung.
- Superdi, S., Rasuli, M., & Silfi, A. (2017). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sijunjung)*.
- Tandibato, I. M. (2021). *PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN, AKSESIBILITAS, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN SIGI*.
- Trimulyono, A. T. A., Hadi, E. H. S. E., & Pujo, I. P. I. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Batang Jawa Tengah Melalui Pengembangan Industri Galangan Kapal Tradisional. *INFO*, 18(1), 37–43.
- Waode, A. M. (2016). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Empiris di Kota Baubau)*.
- YANI, A. A. (t.t.). *PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL, KONSEP VALUE FOR MONEY, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI ERA*

*DIGITAL (DI BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)
PROVINSI SULAWESI SELATAN).*

Yulianti, W., Kamaliah, K., & Rasuli, M. (t.t.). Pengaruh Kompetensi, Teknologi Informasi, Sistem Akuntansi, Internal Control terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Mengelola Keuangan Desa (Studi Empiris di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan Tahun 2018). *Jurnal Ekonomi*, 27(4), 386–398.